

ANALISIS KOMPETENSI PEDAGOGIK GURU PENDIDIKAN PANCASILA BERLATAR BELAKANG NON-KEPENDIDIKAN DALAM PEMBELAJARAN DI SMP NEGERI 31 KERINCI

Rohmi Ardiansah¹, Hendra², Nurmalia Dewi³
^{1,2,3}Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan,
FKIP Universitas Jambi
Rohmiardiansah01@gmail.com¹ hendra92@unja.ac.id²
nurmalia.dewi@unja.ac.id³

ABSTRACT

This study aims to analyze the pedagogical competence of Pancasila Education teachers with non-education academic backgrounds and to identify the factors that hinder them in the learning process at SMP Negeri 31 Kerinci. The background of this problem stems from the presence of teachers with academic backgrounds in Public Administration and Government Science who teach the subject, which affects classroom instruction. This study used a descriptive qualitative approach, with data collected through observation, interviews, and documentation. The informants involved were the school principal as the main informant, the teachers concerned as key informants, and students as additional informants. The results show that teachers' pedagogical competence has run fairly well in preparing teaching modules and utilizing basic technology, but overall it is still in an adaptation stage. Classroom management and approaches to students tend to be reactive, and evaluation still focuses on low-order cognitive skills (LOTS) without a systematic attitude assessment rubric. This condition is influenced by several inhibiting factors, such as limited basic pedagogical competence, facility constraints that trigger dependence on textbooks, and difficulty adjusting module time allocation to classroom dynamics. In addition, teachers also face constraints in adapting to the administration of the Merdeka Curriculum and difficulty designing evaluation instruments based on Higher Order Thinking Skills (HOTS). Overall, it can be concluded that although non-education background teachers have shown willingness, adaptation efforts, and good professional responsibility, their pedagogical competence has not yet fully reached the ideal standard, so continuous capacity building through structured training and mentoring is still needed.

Keywords: pedagogical competence; non-education teacher background; Pancasila education

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kompetensi pedagogik guru Pendidikan Pancasila berlatar belakang non-kependidikan serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya dalam proses pembelajaran di SMP Negeri 31 Kerinci. Latar belakang masalah ini bermula dari adanya guru dengan disiplin keilmuan Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Pemerintahan yang mengampu mata pelajaran tersebut, yang berdampak pada proses pengajaran di kelas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui

teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan yang dilibatkan mencakup kepala sekolah sebagai informan utama, guru bersangkutan sebagai informan kunci, dan siswa sebagai informan tambahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi pedagogik guru sudah berjalan cukup baik dalam menyusun modul ajar dan memanfaatkan teknologi dasar, namun secara keseluruhan masih dalam tahap adaptasi. Pengelolaan kelas dan pendekatan terhadap siswa cenderung bersifat reaktif, dan evaluasi masih terfokus pada kemampuan kognitif tingkat rendah (LOTS) tanpa rubrik penilaian sikap yang sistematis. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor penghambat, seperti minimnya kompetensi pedagogik dasar, keterbatasan fasilitas yang memicu ketergantungan pada buku paket, dan kesulitan menyesuaikan alokasi waktu modul dengan dinamika kelas. Selain itu, guru juga menghadapi kendala dalam beradaptasi dengan administrasi Kurikulum Merdeka serta kesulitan merancang instrumen evaluasi berbasis Higher Order Thinking Skills (HOTS). Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa meskipun guru berlatar belakang non-kependidikan telah menunjukkan kemauan, upaya adaptasi, dan tanggung jawab profesional yang baik, kompetensi pedagogik mereka belum sepenuhnya mencapai standar ideal sehingga peningkatan kapasitas melalui pembinaan berkelanjutan masih sangat diperlukan.

Kata Kunci: Kompetensi Pedagogik, Guru Pendidikan Pancasila, Non-Keependidikan 2005 tentang Guru dan Dosen, setiap

A. Pendahuluan

Pendidikan Pancasila merupakan salah satu mata pelajaran strategis dalam sistem pendidikan nasional yang bertujuan membentuk karakter, nasionalisme, dan sikap bernegara peserta didik. Keberhasilan pembelajaran mata pelajaran ini sangat ditentukan oleh kompetensi pedagogik guru, yaitu kemampuan memahami psikologi peserta didik, merancang pembelajaran yang bermakna, serta menciptakan suasana kelas yang demokratis dan bernilai luhur. Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun

guru wajib memiliki empat kompetensi dasar, yaitu kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial, sebagai standar minimal dalam menjalankan tugas keprofesian.

Data hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) yang dipaparkan dalam Budget Issue Brief DPR RI (2022) menunjukkan bahwa kualitas guru di Indonesia masih menghadapi tantangan serius. Nilai rata-rata UKG justru mengalami penurunan dari tahun ke tahun, yaitu sebesar 57 pada 2019, menurun menjadi 53,02 pada 2020, dan kembali turun ke angka 50,64 pada 2021, padahal standar kompetensi minimal yang ditetapkan

pemerintah adalah 55. Kondisi ini menegaskan bahwa secara umum kompetensi guru masih berada di bawah standar, salah satu penyebabnya adalah ketidaksesuaian latar belakang pendidikan guru dengan mata pelajaran yang diampunya.

Maula dan Nalim (2024) menegaskan bahwa latar belakang pendidikan guru berpengaruh signifikan terhadap kompetensi pedagogik yang dimilikinya. Guru dengan latar belakang pendidikan yang sesuai, terutama dari jurusan kependidikan, cenderung lebih memahami prinsip dasar pembelajaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Sebaliknya, guru non-kependidikan lebih banyak mengandalkan pengalaman mengajar dan proses belajar mandiri di lapangan tanpa fondasi teori pedagogik yang formal.

Kondisi ini teramati secara nyata di SMP Negeri 31 Kerinci. Hasil observasi awal menunjukkan bahwa guru Pendidikan Pancasila masih bergantung pada buku teks sebagai sumber utama pembelajaran, dengan penyampaian materi yang berpusat pada guru tanpa variasi metode

maupun media, sehingga sebagian siswa tampak kurang fokus dan kurang antusias mengikuti pelajaran. Hasil wawancara dengan kepala sekolah juga mengonfirmasi bahwa sekolah masih menghadapi keterbatasan jumlah guru yang berlatar belakang pendidikan sesuai, sehingga penempatan guru pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila tidak selalu linear dengan disiplin ilmu yang dimiliki.

Tabel 1 Data Guru Pendidikan Pancasila SMP Negeri 31 Kerinci

Inisial Guru	Latar Belakang Pendidikan	Status Sertifikasi
MF	S1 Ilmu Administrasi Negara	Belum sertifikasi
BJ	S1 Ilmu Pemerintahan	Belum sertifikasi

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa mata pelajaran Pendidikan Pancasila di SMP Negeri 31 Kerinci diampu oleh guru dengan latar belakang non-kependidikan, yaitu Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Pemerintahan, dan keduanya belum memiliki sertifikasi pendidik. Kondisi ini diperkuat oleh Andika, dkk. (2022) yang menyatakan bahwa guru non-kependidikan menghadapi kendala kompleks dalam empat domain utama, yaitu memahami karakteristik peserta didik, merancang perangkat

pembelajaran, menciptakan suasana kelas yang kondusif, serta melaksanakan penilaian proses dan sikap secara efektif.

Penelitian ini berbeda dari kajian sebelumnya karena secara khusus mengkaji guru Pendidikan Pancasila non-kependidikan yang belum tersertifikasi di daerah tertinggal, yaitu SMP Negeri 31 Kerinci, melalui pendekatan deskriptif kualitatif yang mendalam. Kebaruan penelitian ini terletak pada konteks lokasi, latar belakang keilmuan guru, serta faktor penghambat spesifik yang dihadapi guru non-kependidikan dalam mengajar Pendidikan Pancasila. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kompetensi pedagogik guru Pendidikan Pancasila non-kependidikan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pembelajaran di SMP Negeri 31 Kerinci. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian kompetensi guru non-kependidikan, sekaligus manfaat praktis bagi guru, sekolah, pemerintah, dan peneliti selanjutnya dalam upaya peningkatan mutu pembelajaran Pendidikan Pancasila.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan naturalistik, karena bertujuan untuk menggambarkan dan memahami secara mendalam bagaimana guru Pendidikan Pancasila non-kependidikan melaksanakan praktik pedagogiknya dalam pembelajaran, serta faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami perilaku dan praktik guru dalam kondisi alami tanpa manipulasi variabel apa pun, melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumentasi yang dianalisis secara induktif (Sugiyono, 2018).

Penelitian dilaksanakan di SMP Negeri 31 Kerinci, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, pada periode Januari sampai dengan Maret 2026. Sumber data penelitian dipilih secara purposif karena dianggap paling relevan dan informatif dalam menjawab fokus penelitian. Adapun informan penelitian terdiri atas tiga kategori sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2 Informan Penelitian

Jabatan	Jumlah	Kategori Informan
Kepala Sekolah	1	Utama
Guru Non-Kependidikan	3	Kunci
Siswa	5	Tambahan
Total	9	

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga cara, yaitu observasi partisipatif terhadap proses pembelajaran di kelas, wawancara mendalam dengan kepala sekolah, guru, dan siswa, serta dokumentasi berupa modul ajar, hasil evaluasi, dan dokumen pendukung lainnya. Ketiga teknik ini digunakan secara berlapis melalui triangulasi untuk meningkatkan validitas data yang diperoleh.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan model analisis interaktif yang terdiri atas empat tahap, yaitu pengumpulan data (data collection), reduksi data (data reduction) dengan merangkum dan memilih data yang relevan dengan praktik pedagogik guru non-kependidikan, penyajian data (data display) dalam bentuk naratif dan tabel ringkas, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/verification) yang dilakukan dengan kembali ke data

lapangan untuk memastikan keabsahan interpretasi.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, yaitu membandingkan data dari kepala sekolah, guru, dan siswa; triangulasi teknik, yaitu membandingkan data dari observasi, wawancara, dan dokumentasi; serta triangulasi waktu, yaitu melakukan pengecekan data secara berulang pada waktu yang berbeda hingga diperoleh data yang kredibel.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

SMP Negeri 31 Kerinci merupakan salah satu sekolah menengah pertama di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, yang memiliki kondisi khusus karena tidak memiliki guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang berlatar belakang pendidikan murni dari jurusan tersebut. Sekolah ini memiliki 46 peserta didik dan didukung oleh 17 tenaga pendidik, namun hanya 4 orang yang telah memiliki sertifikasi pendidik. Fasilitas pembelajaran yang tersedia meliputi buku paket, papan tulis di setiap kelas, serta satu unit proyektor dan satu unit Smart TV yang

harus digunakan secara bergantian, sehingga guru masih sering kembali menggunakan metode konvensional dalam pembelajaran.

1. Kompetensi Pedagogik Guru

Pendidikan Pancasila Non-Kependidikan

a. Pemahaman terhadap Peserta Didik. Guru mengenali karakteristik dan kemampuan awal siswa hanya melalui observasi visual dan interaksi sehari-hari, seperti keaktifan bertanya, bukan melalui asesmen diagnostik yang terstruktur. Kondisi ini menimbulkan bias pedagogik, di mana perhatian guru lebih terfokus pada siswa yang aktif atau yang menimbulkan kegaduhan, sementara siswa yang pasif dan lambat belajar kurang terfasilitasi. Ketiadaan pemetaan awal ini menyulitkan guru dalam merancang pembelajaran berdiferensiasi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005.

b. Merancang Pembelajaran. Guru telah mampu menyusun Modul Ajar sesuai format standar sekolah, namun sinkronisasi antara perencanaan dan pelaksanaan di kelas masih sering terhambat. Metode pembelajaran masih didominasi ceramah satu arah, fleksibilitas guru

dalam mengubah strategi ketika siswa jenuh masih minim, dan motivasi yang diberikan masih berupa penguatan ekstrinsik dasar seperti pujian, belum menyentuh desain pembelajaran berbasis rasa ingin tahu (inquiry-based). Temuan ini kurang sejalan dengan pandangan Ramdani, dkk. (2023) bahwa pembelajaran semestinya mengembangkan potensi kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik secara utuh.

c. Menciptakan Suasana Kelas yang Kondusif. Pengelolaan kelas masih bersifat reaktif, misalnya melalui pertanyaan mendadak atau teguran tegas saat kelas gaduh, tanpa didahului kesepakatan atau kontrak belajar di awal pembelajaran. Penguatan positif berupa pujian juga masih sangat terbatas. Dominasi penanganan reaktif dibandingkan strategi preventif ini menyebabkan ketertiban kelas sulit dipertahankan secara konsisten.

d. Pemanfaatan Teknologi dan Media Pembelajaran. Guru memiliki kesadaran akan pentingnya media visual untuk membantu pemahaman siswa, namun kompetensi ini belum optimal karena keterbatasan sarana, yaitu hanya tersedia satu unit proyektor yang digunakan secara

bergantian. Akibatnya, pembelajaran sering kembali berpusat pada buku paket dan papan tulis, sehingga siswa mudah merasa bosan mengingat karakteristik materi Pendidikan Pancasila yang sarat teks dan aturan perundang-undangan.

e. Evaluasi Pembelajaran.

Evaluasi telah dilaksanakan melalui ulangan harian, ujian, dan penugasan, namun instrumen yang digunakan masih didominasi soal kognitif tingkat rendah (LOTS), sementara penyusunan soal berbasis Higher Order Thinking Skills (HOTS) masih menjadi kendala. Penilaian sikap dan keterampilan pun belum menggunakan rubrik yang jelas, dan pelaksanaan remedial masih bersifat konvensional tanpa disertai intervensi pedagogik khusus.

2. Faktor Penghambat Guru Non-Kependidikan dalam Pembelajaran

a. Kompetensi Pedagogik Minim. Ketidadaan fondasi pendidikan keguruan formal membuat guru kesulitan menguasai keterampilan dasar mengajar, khususnya dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Guru cenderung kaku dan menyamaratakan instruksi tugas tanpa penyesuaian profil belajar siswa, sehingga kerap memicu

hilangnya fokus dan menurunnya motivasi belajar.

b. Keterbatasan Bahan Ajar.

Guru masih memiliki ketergantungan tinggi pada buku paket sebagai sumber utama pembelajaran. Pengembangan bahan ajar tambahan, seperti Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) atau media interaktif, masih sangat terbatas akibat minimnya pelatihan dan pengalaman guru dalam merancang bahan ajar kreatif.

c. Kesulitan Mengatur Waktu Pembelajaran. Alokasi waktu yang telah disusun dalam modul ajar sering kali tidak sesuai dengan kondisi nyata di kelas akibat dinamika siswa yang kurang fokus, sehingga materi yang direncanakan untuk satu pertemuan tidak selalu tersampaikan secara menyeluruh.

d. Kesulitan Adaptasi Kurikulum yang Berubah-ubah.

Guru masih berada pada fase adaptasi awal dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. Keterbatasan latar belakang keilmuan keguruan formal menimbulkan kendala teknis dalam memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, terutama dalam

menyelaraskan Capaian Pembelajaran dengan heterogenitas kemampuan siswa.

e. Kendala Evaluasi Pembelajaran. Guru kesulitan menyusun soal berbasis HOTS karena membutuhkan kemampuan analisis dan perancangan soal yang lebih kompleks, sementara variasi teknik penilaian seperti penilaian proyek atau portofolio belum sepenuhnya diterapkan secara maksimal.

Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa meskipun guru non-kependidikan di SMP Negeri 31 Kerinci telah menunjukkan komitmen dan tanggung jawab profesional dalam menjalankan tugas pengajaran, pelaksanaan kompetensi pedagogik mereka belum sepenuhnya mencapai standar ideal sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Andika, dkk. (2022) dan Prihono, dkk. (2022) yang menekankan bahwa penguatan kapasitas guru non-kependidikan tidak cukup hanya mengandalkan pengalaman mengajar dan pembelajaran mandiri di lapangan, tetapi memerlukan pembinaan,

supervisi akademik, dan pelatihan profesional yang berkelanjutan agar kompetensi pedagogik dapat berkembang secara optimal.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kompetensi pedagogik guru Pendidikan Pancasila berlatar belakang non-kependidikan di SMP Negeri 31 Kerinci, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kompetensi pedagogik oleh guru telah berjalan cukup baik dalam hal komitmen menyusun perangkat pembelajaran, memanfaatkan teknologi dasar, dan melaksanakan evaluasi, namun secara keseluruhan masih berada pada tahap adaptasi. Pemahaman terhadap peserta didik masih bersifat umum, perancangan pembelajaran masih didominasi metode ceramah, pengelolaan kelas cenderung reaktif, pemanfaatan teknologi belum optimal akibat keterbatasan sarana, dan evaluasi masih berfokus pada kemampuan kognitif tingkat rendah tanpa rubrik penilaian sikap yang sistematis.

Kondisi tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor penghambat, yaitu minimnya kompetensi pedagogik dasar akibat ketiadaan fondasi

pendidikan keguruan formal, keterbatasan bahan ajar yang menyebabkan ketergantungan pada buku paket, kesulitan mengatur waktu pembelajaran sesuai dinamika kelas, kesulitan beradaptasi dengan perubahan Kurikulum Merdeka, serta kendala dalam menyusun instrumen evaluasi berbasis Higher Order Thinking Skills (HOTS).

Secara teoretis, temuan ini memperkuat konsep bahwa kompetensi pedagogik merupakan kompetensi utama yang harus dimiliki guru untuk melaksanakan pembelajaran secara efektif, dan menegaskan bahwa peningkatan kompetensi pedagogik guru non-kependidikan tidak cukup hanya melalui pengalaman mengajar, tetapi memerlukan penguatan melalui pendidikan formal, pelatihan, dan pendampingan berkelanjutan. Secara praktis, bagi guru, penelitian ini menjadi bahan refleksi untuk terus mengembangkan metode pembelajaran yang variatif, pengelolaan waktu yang efektif, dan instrumen evaluasi berbasis HOTS. Bagi pihak sekolah, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk memberikan pendampingan, supervisi akademik, dan pelatihan khusus bagi

guru non-kependidikan. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat menjadi acuan dalam meningkatkan kualitas guru melalui perbaikan sistem rekrutmen dan pelatihan berbasis kebutuhan lapangan. Adapun bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan kajian ini melalui pendekatan kuantitatif atau penelitian tindakan kelas guna memperoleh solusi yang lebih aplikatif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran Pendidikan Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhandayani, A. (2020). Modul Metode Penelitian 2 (Kualitatif). *Bussiness Law Binus*, 7(2).
- Andika Rizky Nugraha, Setianingsih, E., Putri, F. W., Jaelani, W. R., & Vichaully, Y. (2022). *Problematika Guru Honorer dan Guru Nondik di Era Society 5.0*. Universitas Islam Bandung.
- Andini, N., Haeril, & Hamka. (2025). Pengaruh kompetensi pedagogik guru terhadap motivasi belajar siswa di SMA Negeri 15 Bone. *Jurnal Edukasi Nusantara*, 4(2), 145–152.

- Ainur, R., & Marwan, R. H. (2018). Upaya guru sekolah dasar non-kependidikan dalam mengembangkan kompetensi pedagogik. *Jurnal Eduscience*, 3(2), 54–64.
- Akbar, A. (2021). Pentingnya kompetensi pedagogik guru. *Jurnal Pendidikan Guru*, 2(1), 23–30.
- Balqis, N., Iramadhani, D., & Amalia, I. (2023). Gambaran kesejahteraan psikologis guru honorer non pendidikan pada tingkat PAUD dan TK di Kabupaten Aceh Utara. *INSIGHT: Jurnal Penelitian Psikologi*, 1(3), 584–598.
- Badan Anggaran DPR RI. (2022). *Budget Issue Brief: Peningkatan Kualitas Guru di Indonesia*. Jakarta: DPR RI.
- Haetami, A. (2024). Pengaruh persepsi siswa terhadap kompetensi pedagogik guru dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar IPS di SMP Swasta Bekasi. *Real Didaktika: Jurnal Pendidikan*, 14(1), 56–65.
- Maula, N. N., & Nalim. (2024). Pengaruh latar belakang pendidikan guru terhadap kompetensi pedagogik dan hasil belajar matematika siswa. *CIRCLE: Jurnal Pendidikan Matematika*.
<https://doi.org/10.28918/circle.v4i1.6906>
- Nur, H. M., & Fatonah, N. (2022). Paradigma kompetensi guru. *Jurnal PGSD*, 1(1).
- Prihono, E. W., Retnawati, H., Lapele, F., & Waluyo, W. B. (2022). The quality of Indonesian teachers in the digital era: A meta-analysis. *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*, 26(2), 186–200.
- Ramdani, N. G., Fauziyyah, N., Fuadah, R., Rudiyo, S., Septianingrum, Y. A., Salamatussa'adah, N., & Hayani, A. (2023). Definisi dan teori pendekatan, strategi, dan metode pembelajaran. *Indonesian Journal of Elementary Education and Teaching Innovation*, 2(1), 20–31.
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003*

*tentang Sistem Pendidikan
Nasional.* Jakarta: Sekretariat
Negara.

Republik Indonesia. (2005). *Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2005
tentang Guru dan Dosen.*
Jakarta: Sekretariat Negara.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian
Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.*
Bandung: Alfabeta.